



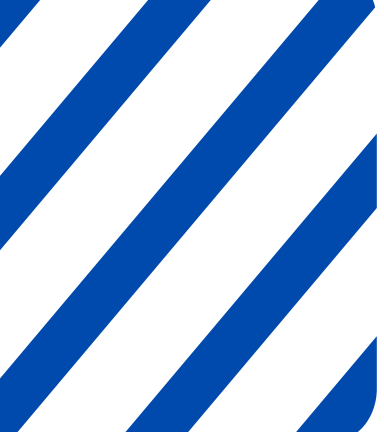
djp

PER-05/PJ/2021

Perubahan atas PER-07/PJ/2020 tentang Tempat Pendaftaran Wajib Pajak dan Pelaku Usaha Melalui Sistem Elektronik dan/atau Tempat Pelaporan Usaha PKP pada KPP di Lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, KPP di Lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus, dan KPP Madya

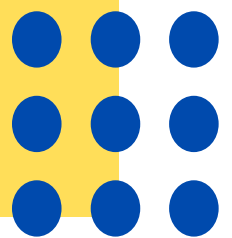
Latar Belakang Perubahan Aturan

1. Terdapat perubahan wilayah kerja unit vertikal di lingkungan DJP sesuai PMK Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas PMK Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak;
2. Memberikan kepastian hukum, kemudahan administrasi, dan meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak tertentu.



Pasal yang Mengalami Perubahan

- Pasal 5 ayat (1)
- Pasal 6 ayat (2) s.d. ayat (9)
- Penambahan Pasal 20A



Perubahan Pasal 5 ayat (1)

Terkait Pelaksanaan Hak dan/atau Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
PPN atau PPN dan PPnBM pada KPP BKM



Ayat (1) huruf b angka 1.

seluruh kewajiban pelaporan PPN atau PPN dan PPnBM dilaksanakan di KPP Madya tempat NPWP Pusat terdaftar

Sebelumnya : tidak ditetapkan

Ayat (1) huruf b angka 2.

kewajiban pelaporan PPN atau PPN dan PPnBM atas seluruh Cabang, termasuk Cabang yang terdaftar pada KPP Madya lain, dilaksanakan pada KPP Madya tempat NPWP Pusat terdaftar

Sebelumnya : Ayat (1) huruf b angka 1

Ayat (1) huruf b angka 3.

dalam hal WP dengan NPWP Pusat terdaftar di KPP Pratama dan NPWP Cabang yang sudah dikukuhkan sebagai PKP terdaftar di KPP Madya, kewajiban pelaporan PPN atau PPN dan PPnBM dilaksanakan pada KPP Madya dimaksud hanya atas Wajib Pajak dengan NPWP Cabang tersebut.

Sebelumnya : Ayat (1) huruf b angka 2

Perubahan Pasal 6

Terkait Pelaksanaan Kak dan/atau Pemenuhan Kewajiban Pemotongan dan Pemungutan PPh yang Dilaksanakan Pada KPP BKM



Perubahan Pasal 6

Ayat (1)

Pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban potput PPh yang dilaksanakan pada KPP BKM, meliputi:

- a. PPh Pasal 21/26;
- b. PPh Pasal 4 ayat (2);
- c. PPh Pasal 23/26;
- d. PPh Pasal 15; dan
- e. PPh Pasal 22.



Perubahan Pasal 6

Ayat (2) huruf a

dalam hal Pusat dan/atau Cabang terdaftar di KPP BKM dan berdomisili di wilayah (Lampiran huruf B), kewajiban potput PPh Pasal 21/26 atas Pusat dan/atau Cabang dilaksanakan di KPP BKM

Ayat (3) huruf a

penyetoran dan penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21/26 menggunakan **NPWP Pusat pada KPP BKM**

Perubahan Pasal 6

Ayat (2) huruf b

dalam hal Pusat WP terdaftar di KPP BKM dan berdomisili di wilayah (Lampiran huruf B), dan Cabang WP berdomisili di luar wilayah (Lampiran huruf B), kewajiban pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 21/26 di KPP BKM dilaksanakan hanya untuk Pusat WP

Ayat (3) huruf b

penyetoran dan penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21/26 menggunakan NPWP Pusat pada KPP BKM dan NPWP Cabang pada KPP di mana Cabang terdaftar

Perubahan Pasal 6

Ayat (2) huruf c

dalam hal Pusat WP berdomisili di luar wilayah (Lampiran huruf B), dan Cabang Wajib Pajak terdaftar di KPP BKM dan berdomisili di wilayah (Lampiran huruf B), kewajiban pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 21/26 di KPP BKM dilaksanakan hanya untuk Cabang Wajib Pajak

Ayat (3) huruf c

penyetoran dan penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21/26 menggunakan NPWP Cabang pada KPP BKM dan NPWP Pusat pada KPP di mana NPWP Pusat terdaftar



Perubahan Pasal 6

Dalam hal Pusat WP berdomisili di luar wilayah (Lampiran huruf B) ditetapkan terdaftar di KPP di lingkungan Kanwil Wajib Pajak Besar dan Kanwil Jakarta Khusus, dan memiliki Cabang Wajib Pajak berdomisili di luar dan/atau di dalam wilayah (Lampiran huruf B), maka

Ayat (4) huruf a

terhadap Pusat WP yang sebenarnya, diterbitkan NPWP Cabang pada KPP Lama yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Pusat WP, yang hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban PPh Pasal 21/26;

Ayat (4) huruf b

penyetoran dan penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21/26 atas Pusat WP yang sebenarnya pada KPP Lama menggunakan NPWP Cabang sebagaimana dimaksud pada huruf a;

Ayat (4) huruf c

NPWP Pusat WP yang ditetapkan terdaftar di KPP di lingkungan Kanwil Wajib Pajak Besar dan Kanwil Jakarta Khusus digunakan untuk melaksanakan kewajiban penyetoran dan penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21/26 untuk Cabang WP yang berada di dalam wilayah (Lampiran huruf B);

Ayat (4) huruf c

terhadap Cabang WP yang berada di luar wilayah (Lampiran huruf B), kewajiban penyetoran dan penyampaian PPh Pasal 21/26 menggunakan NPWP Cabang Wajib Pajak tersebut.

Perubahan Pasal 6

Ayat (5)

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b serta ayat (4), dapat menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21/26 dengan menggunakan NPWP Pusat untuk melaporkan pemenuhan kewajiban PPh Pasal 21 / 26 yang terutang di Pusat dan seluruh Cabang Wajib Pajak berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak secara jabatan.

Perubahan Pasal 6

Tempat Terutang PPh Pasal 21/26 - ayat (2)

Ayat (6) huruf a

untuk imbalan sehubungan dengan pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu bagi pegawai yang terdaftar sebagai pegawai Pusat, terutang di Pusat Wajib Pajak

Ayat (6) huruf b

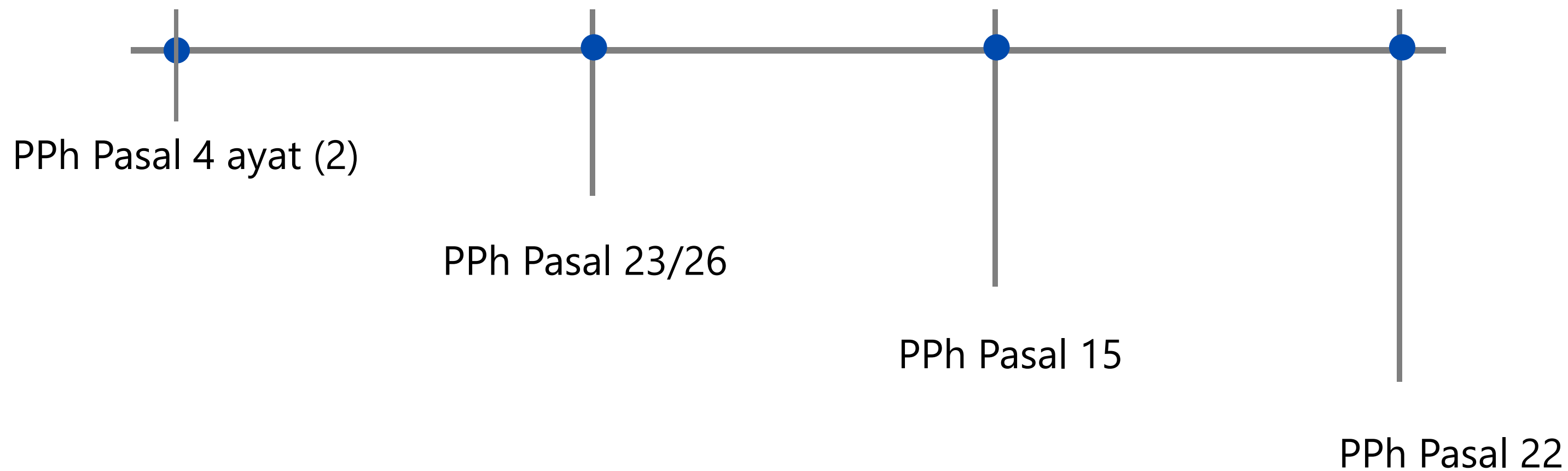
untuk imbalan sehubungan dengan pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu bagi pegawai yang terdaftar sebagai pegawai Cabang, terutang di Cabang Wajib Pajak; dan/atau

Ayat (6) huruf c

untuk imbalan sehubungan dengan jasa kepada bukan pegawai termasuk yang terutang PPh Pasal 21/26, terutang di Pusat atau Cabang yang melakukan pembayaran imbalan kepada bukan pegawai tersebut.

Perubahan Pasal 6 Ayat (7)

Bagaimana dengan perlakuan PPh selain PPh Pasal 21/26?



Perubahan Pasal 6

Mengacu kepada kedudukan hukum pihak yang melakukan penandatanganan perjanjian atau kontrak, baik perjanjian atau kontrak tertulis maupun tidak tertulis

Ayat (7) huruf a

dalam hal perjanjian atau kontrak yang menjadi dasar pelaksanaan transaksi ditandatangani dan dibuat oleh pengurus Pusat, potput PPh terutang di kantor Pusat dan mekanisme potput, penyetoran, serta penyampaian SPT menggunakan NPWP Pusat

Ayat (7) huruf b

dalam hal perjanjian atau kontrak yang menjadi dasar pelaksanaan transaksi ditandatangani dan dibuat oleh pengurus Cabang seperti Kepala Cabang atau Kepala Perwakilan, potput PPh terutang di Cabang dan mekanisme potput, penyetoran, dan penyampaian SPT menggunakan NPWP Cabang

Ayat (7) huruf c

dalam hal Pusat dan Cabang sebagaimana dimaksud pada huruf b terdaftar pada KPP BKM yang sama dan berdomisili di wilayah (Lampiran huruf B), mekanisme potput, penyetoran, dan penyampaian SPT atas PPh menggunakan NPWP Pusat atau NPWP Cabang yang terdaftar pada KPP BKM

Perubahan Pasal 6

Pemotongan PPh yang Dikecualikan dari Ayat (7)

Ayat (8) huruf a

PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan berupa bunga dan dividen

Ayat (8) huruf b

PPh Pasal 23/26 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c atas penghasilan berupa bunga, royalti, dan dividen

Terutang di Pusat dan mekanisme potput, penyetoran, dan penyampaian SPT menggunakan NPWP Pusat.

Perubahan Pasal 6

Terhadap Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP BKM dan memiliki kegiatan usaha di bidang pengalihan tanah dan/atau bangunan dikecualikan dari Ayat (7)

Ayat (9) huruf a

pemenuhan kewajiban pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) yang terutang atas kegiatan usaha pengalihan tanah dan/atau bangunan dilaksanakan pada KPP BKM, dalam hal kegiatan usaha tersebut berada di wilayah dalam Lampiran huruf B

Ayat (9) huruf b

pemenuhan kewajiban pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) yang terutang atas kegiatan usaha pengalihan tanah dan/atau bangunan dilaksanakan pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha berada, dalam hal kegiatan usaha tersebut di luar wilayah dalam Lampiran huruf B

Penambahan Pasal 20A

Kewajiban potput dan penyetoran PPh Pasal 21/26 dengan menggunakan NPWP Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a yang terdaftar pada KPP Madya dengan Wilayah Administrasi Pemotongan atau Pemungutan dan Pembayaran atau Penyetoran Pajak selain Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Lampiran huruf B, dilakukan dengan menggunakan **aplikasi pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21/26 untuk melaporkan pemenuhan kewajiban PPh Pasal 21/26 yang terutang di Pusat dan seluruh Cabang Wajib Pajak**

Apabila aplikasi pelaporan dimaksud **belum tersedia**, maka penyetoran dan pelaporan atas kewajiban pemotongan PPh Pasal 21/26 tersebut **dilakukan dengan menggunakan NPWP Pusat dan NPWP Cabang masing-masing**

PAJAK KUAT
INDONESIA MAJU





Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita

    DitjenPajakRI

 www.pajak.go.id

 1 500 200